



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar belakang	2
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	5
Tabel 2.1	8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah	32
Tabel 3.1	33
BAB IV. PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan adanya acuan tersebut Perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Natuna Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);
- l. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
- m. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian realisasi keuangan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 2.572.729.730,00 dari total anggaran yaitu sebesar Rp. 5.571.191.901,00 atau 46,18%. Terdiri atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 2.542.831.080,00 atau 46,27% dan UPTD BLK sebesar Rp. 29.898.650,00 atau 39,80%.

Adapun capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai Semester II Tahun 2025 sebagai tabel 2.1 berikut :

Tabel: 2.1. Capaian Kinerja Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Sampai Semester II Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	
					5		6		7				8		9		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100	
1	2	3	4	4A	K	RP	K	RP	K	Rp Renja	K	RP DPPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
01.01.		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				33,137,857,665		10,941,193,325		6,206,130,000		5,496,078,383		1,062,388,355		1,480,442,725		2,542,831,080		46.27		13,484,024,405		40.69
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI LAPORAN LKJIP	81.92	400,000,000	74.20	30,698,739	81.91	40,000,000	81.91	3,971,325	74.20	-	0	649,200	74.20	649,200	90.59	16.35	148.40	31,347,939	181	7.84
2.07.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	400,000,000	74.20	30,698,739	100	40,000,000	100	3,971,325	74.20	-	0.00	649,200	74.20	649,200	74.20	16.35	148.40	31,347,939	148	7.84
2.07.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	10	200,000,000	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0.00
2.07.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	12	200,000,000	2	30,698,739	2	40,000,000	2	3,971,325	2	0	0	649,200	2	649,200	100	16.35	2	31,347,939	17	15.67
2.07.01.	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persentase	90	27,030,874,000	80	10,067,415,841	90.00	4,700,030,000	90.00	5,248,277,341	83.33	1,062,388,355	83.33	1,445,622,360	83.33	2,508,010,715	92.59	47.79	163	12,575,426,556	181	46.52
2.07.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat	Ketepatan Waktu	1	23,123,150,000	1	8,287,059,113	1	4,700,030,000	1	3,942,927,067	1	974,657,332	1	1,126,486,903	1	2,101,144,235	100	53.29	2	10,388,203,348	200	44.93
2.07.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	23,123,150,000	31	8,287,059,113	33	4,700,030,000	32	3,942,927,067	33	974,657,332	38	1,126,486,903	38	2,101,144,235	118.73	53.29	31	10,388,203,348	94	44.93
2.07.01.2.05.		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase	95	23,123,150,000	1	8,287,059,113	95	15,000,000	1	-	-	-	-	0	0	0	-	1	8,287,059,113	1	35.84	
2.07.01.2.05.01.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	33	23,123,150,000	31	8,287,059,113	2	15,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0.00	-	31	8,287,059,113	94	35.84	
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persentase	61	1,446,116,000	57	465,526,679	60	257,756,020	60	165,203,836	0.00	-	0.00	16,757,140	0.00	16,757,140	0.00	10.14	57	482,283,819	93	33.35
2.07.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	32,000,000	1	35,818,000	1	3,000,000	1	14,574,000	0	0	0	6,968,640	0	6,968,640	0	47.82	1	62,786,640	20	106.21
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	251,000,000	0	35,208,350	2	50,000,000	2	35,522,182	0	0	0	4,906,000	0	4,906,000	0	13.81	0	40,114,350	0	15.98
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	240,000,000	2	24,836,100	2	50,000,000	2	34,238,000	0	0	0	4,882,500	0	4,882,500	0	14.26	2	29,720,600	20	12.38
2.07.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	35,000,000	5	10,926,000	5	7,000,000	5	1,125,000	0	0	0	0	0	0	-	5	10,926,000	20	31.22	
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	105	525,116,000	22	252,618,879	20	131,756,020	40	79,744,654	0	0	0	0	0	0	0.00	-	22	252,618,879	14	48.11
2.07.01.2.06.10.		Penelaahan Anap Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Anap Dinamis yang disusun	Dokumen	80	42,000,000	0	-	12	10,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0.00	
2.07.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase	70	135,000,000	56.27	150,400,410	65	272,500,000	65	148,378,430	0	-	0	1,401,764	0.00	1,401,764	0.00	0.94	56.27	151,802,174	80	112.45
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	135,000,000	5	150,400,410	7	272,500,000	4	148,378,430	0	0	0	1,401,764	0	1,401,764	0.00	0.94	5	151,802,174	31	112.45
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	100	1,485,000,000	100	869,839,828	100	296,000,000	100	516,388,074	19.23	87,731,023	13.5	91,221,501	13.54	178,953,524	13.54	34.65	114	1,048,793,352	114	70.63

Kode	Sas ara n	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	
													I		II									
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		12=8+9+10+11		13=12/7 x100
					K	RP	K	RP	K	Rp Renja	K	RP DPPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	46,000,000	12	37,511,167	12	5,000,000	12	36,123,682	0	0	0	9,287,500	0	9,287,500	0	23.74	12	46,798,667	20	101.74
2.07.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	344,000,000	2	119,752,589	2	91,000,000	2	99,251,700	2	12,475,535	2	13,691,882	4	26,167,437	200	26.37	0	145,920,026	50	42.42
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1,095,000,000	12	712,576,072	12	200,000,000	12	378,032,692	3	75,255,468	3	68,243,119	6	145,498,587	50	37.96	18	856,074,659	30	78.18
2.07.01.2.09.		Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan	Persentase	60	841,608,000	59.25	294,589,811	59.50	303,000,000	59.50	475,379,834	-	-	30.43	209,754,052	30.43	209,754,052	51.2	44.12	90	504,343,863	149	59.93
2.07.01.2.09.02.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	11	100,000,000	11	108,968,186	11	20,000,000	11	107,037,420	0	0	3	26,771,438	11	26,771,438	100.00	25.01	22	135,739,624	200	135.74
2.07.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	169,000,000	10	18,625,000	10	33,000,000	10	32,610,000	0	0	3	7,218,000	3	7,218,000	30.00	22.13	13	25,843,000	43	15.29
2.07.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rahablitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Gedung	12	385,608,000	1	166,996,625	2	200,000,000	2	335,732,414	0	0	1	175,764,614	1	175,764,614	0	-	2	342,761,239	17	88.89
2.07.03.		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	0.24	2,283,356,000	1.12	458,853,447	0.20	916,100,000	0.20	179,204,340	0	-	0	1,784,750	0.00	1,784,750	-	1.00	1	466,638,197	112.00	26.17
2.07.03.2.01.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persentase	83	2,283,356,000	74.10	458,853,447	80	916,100,000	80	179,204,340	0	-	0	1,784,750	0.00	1,784,750	0.00	1.00	74.10	466,638,197	89	26.17
2.07.03.2.01.01.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	80	1,433,356,000	16	458,853,447	16	706,100,000	16	179,204,340	0	0	0	1,784,750	0	1,784,750	0	1.00	16	466,638,197	20	32.13
2.07.03.2.01.02.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kerjasama (MoU)	Koordinasi	4	200,000,000	0	0	1	50,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0.00
2.07.03.2.01.03.		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	21	649,800,000	0	-	2	160,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0.00
2.07.04.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang diTempatkan	Persentase	100	183,627,665	67.35	12,165,258	96	50,000,000	96	15,579,304	0	-	0	8,672,433	0.00	8,672,433	0.00	55.67	67	26,837,691	67	11.35
2.07.04.2.01.		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	9	183,627,665	9	12,165,258	8	50,000,000	8	15,579,304	0	-	0	8,672,433	0	8,672,433	0.00	55.67	9	26,837,691	100	11.35
2.07.04.2.01.05.		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	183,627,665	42	12,165,258	20	50,000,000	20	15,579,304	0	0	0	8,672,433	0	8,672,433	0	55.67	42	26,837,691	42	11.35
2.07.05.		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase	6	1,350,000,000	26.92	177,348,944	5	300,000,000	5	38,468,194	35.71	-	37.93	16,160,803	0.00	16,160,803	0.0	42.01	27	193,509,747	449	14.33
2.07.05.2.02.		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persentase	70	1,350,000,000	0	177,348,944	65	300,000,000	65	38,468,194	0	-	0	16,160,803	0	16,160,803	0	42.01	0	193,509,747	0	14.33
2.07.05.2.02.01.		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	5	720,000,000	0	140,768,244	1	150,000,000	1	30,968,887	0	0	0	9,527,896	0	9,527,896	0	30.77	0	150,296,140	0	20.87
2.07.05.2.02.05.		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3250	630,000,000	3,907	36,580,700	3250	150,000,000	3,250	7,499,307	10,398	0	8,261	6,632,907	0	6,632,907	0.00	88.45	3,907	43,213,607	120	6.86
3.32.02.		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	Persentase	100	1,310,000,000	100	156,774,232	100	100,000,000	100	8,970,119	100	-	100	7,236,319	100	7,236,319	100	80.67	100	164,010,551	100	12.52

Kode	Sas ara n	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	
													I		II									
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		11=8+9+10+11		13=12/7 x100
					K	RP	K	RP	K	Rp Renja	K	RP DPPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
3.32.02.2.01 .		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	1,310,000,000	1	156,774,232	1	100,000,000	1	8,970,119	1	-	1	7,236,319	1	7,236,319	100	80.67	2	164,010,551	200	12.52
3.32.02.2.01 .04.		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	5	1,310,000,000	1	156,774,232	1	100,000,000	1	8,970,119	0	0		7,236,319	0	7,236,319	0	80.67	1	164,010,551	20	12.52
3.32.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Persentase	100	580,000,000	100	37,936,864	100	100,000,000	100	1,607,860	100	-	100	316,860	100	316,860	100	19.71	100	38,253,724	100	6.60
3.32.04.2. 01.		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Pengembangannya	SKP	2	580,000,000	2	37,936,864	2	100,000,000	2	1,607,860	2	-	2	316,860	2	316,860	100	19.71	4	38,253,724	200	6.60
3.32.04.2.01 .02.		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kemandirian dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kemandirian	SP	6	580,000,000	6	37,936,864	6	100,000,000	6	1,607,860	3	0	3	316,860	6	316,860	100.0	19.71	6	38,253,724	100	6.60
01. 02.		BALAI LATIHAN KERJA				197,000,000		279,929,166		36,000,000		75,113,518		9,000,000		20,898,650		29,898,650		39.80				
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Sekretariat yang Sesuai SOP	Persentase	90	197,000,000	85	279,929,166	90	36,000,000	90	75,113,518	83.33	9,000,000	83.33	20,898,650	83.33	29,898,650	92.50	39.80	168.33	309,827,816	187.0	****
2.07.01.2. 06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	61	81,000,000	57	140,523,837	60	12,000,000	60	12,113,083	0	0	0	1,021,570	0	1,021,570	-	8.43	57.0	141,545,407	93	174.7
2.07.01.2.06 .02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	21,000,000	0	41,198,916	1	0	1	1,645,412	0	0	0	822,706	0	822,706	-	50.00	-	42,021,622	-	****
2.07.01.2.06 .03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	20,000,000	1	1,438,000	1	4,000,000	1	6,315,871	0	0	0	198,864	0	198,864	-	3.15	1.00	1,636,864	20.00	8.18
2.07.01.2.06 .05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	15,000,000	1	8,050,000	2	3,000,000	2	3,551,800	0	0	0	-	0	-	-	0.00	1.00	8,050,000	10.00	53.67
2.07.01.2.06 .09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	25,000,000	8	89,836,921	5	5,000,000	5	600,000	0	0	0	-	0	-	-	0.00	8.00	89,836,921	32.00	****
2.07.01.2. 08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	100	116,000,000	80	139,405,329	100	24,000,000	100	63,000,435	12.5	9,000,000	12.5	19,877,080	12.50	28,877,080	12.5	45.84	92.5	168,282,409	93	145.1
2.07.01.2.08 .01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	21,000,000	12	21,005,329	12	5,000,000	12	4,500,435	0	-	0	1,877,080	0	1,877,080	-	41.71	12.00	22,882,409	25.00	****
2.07.01.2.08 .04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	95,000,000	12	118,400,000	12	19,000,000	12	58,500,000	3	9,000,000	3	18,000,000	6	27,000,000	50.00	46.15	18.00	145,400,000	30.00	****
Jumlah Anggaran						33,334,857,665		11,221,122,491		6,242,130,000		5,571,191,901		1,071,388,355		1,501,341,375		2,572,729,730						

Capaian kinerja sampai pada Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan belum tercapai dengan baik, dengan penjabaran sebagai berikut ;

1. Kegiatan yang sudah terealisasi merupakan kegiatan kebutuhan dasar seperti pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran gaji PTT dan Harlep, pembayaran tagihan Listrik dan air serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional. Selain dari kebutuhan dasar diatas, penyerapan anggaran juga difokuskan untuk pembayaran utang belanja tahun 2024.
2. Untuk kegiatan diluar kebutuhan dasar dan utang 2024 belum bisa terealisasikan mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia di rekening bendahara dan sebisa mungkin untuk menghemat anggaran.
3. Adanya informasi dari BPKPAD bahwa akan adanya pengurangan akibat efisiensi anggaran yang diperuntukan untuk menutupi kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan sampai akhir tahun 2025, maka kepala dinas menghimbau agar seluruh kegiatan selain kebutuhan dasar dan utang 2025 untuk tidak dijalankan sampai adanya pemberitahuan lanjutan dari BPKPAD.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 6 (Enam) program yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1.1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

4. Program Hubungan Industrial
 1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 1. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - 1.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - 1.1 Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

Sementara itu UPTD BLK (Balai Latihan Kerja) terdiri atas 1(satu) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran **Tabel 3.1** sebagai berikut :

Tabel 3.1. Renja Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				8,145,886,020.00	6,256,338,200.00	5,376,576,190.00	-2,769,309,830.00				7,690,886,020.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,845,886,020.00	6,256,338,200.00	5,365,998,211.00	-2,479,887,809.00				7,365,886,020.00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7,845,886,020.00	6,256,338,200.00	5,365,998,211.00	-2,479,887,809.00				7,365,886,020.00
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81.91 Nilai	74.20 Nilai	5,979,786,020.00	5,976,743,070.00	5,304,495,373.00	10,000,000.00				5,989,786,020.00
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	74.20 Persen	40,000,000.00	25,089,208.00	2,921,325.00	-37,078,675.00				60,000,000.00
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	40,000,000.00	25,089,208.00	2,921,325.00	-37,078,675.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)		60,000,000.00
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	4,700,030,000.00	4,924,489,000.00	4,324,204,956.00	-375,825,044.00				4,700,030,000.00
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	0 Paket	3,000,000.00	26,000,000.00	14,574,000.00	11,574,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		3,000,000.00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	50,000,000.00	33,000,000.00	35,522,182.00	-14,477,818.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		50,000,000.00	
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6,000,000.00	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	50,000,000.00	25,000,000.00	31,238,000.00	-18,762,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		50,000,000.00	
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		7,000,000.00
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	40 Laporan	10 Laporan	131,756,020.00	157,053,360.00	65,964,754.00	-65,791,266.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		131,756,020.00
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</i>	65 Persen	65 Persen	368,000,000.00	13,400,000.00	148,378,430.00	-219,621,570.00				368,000,000.00
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	272,500,000.00	0.00	0.00	-272,500,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		272,500,000.00
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit	2 Unit	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	0 Unit	85,500,000.00	13,400,000.00	148,378,430.00	62,878,430.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		85,500,000.00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran</i>	100 Persen	100 Persen	296,000,000.00	506,060,882.00	404,423,892.00	108,423,892.00				296,000,000.00
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000.00	32,731,682.00	18,289,500.00	13,289,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		5,000,000.00
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan	2 Laporan	91,000,000.00	98,629,200.00	95,601,700.00	4,601,700.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		91,000,000.00
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	200,000,000.00	374,700,000.00	290,532,692.00	90,532,692.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		200,000,000.00
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</i>	59.50 Persen	59.50 Persen	303,000,000.00	263,650,620.00	277,267,834.00	-25,732,166.00				303,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	11 Unit	11 Unit	20,000,000.00	88,600,620.00	66,675,420.00	46,675,420.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		20,000,000.00
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	7 Unit	33,000,000.00	25,050,000.00	24,860,000.00	-8,140,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		33,000,000.00
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	0 Unit	200,000,000.00	150,000,000.00	185,732,414.00	-14,267,586.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		200,000,000.00
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	2 Unit	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	0.20 Persen	1.29 Persen	966,100,000.00	210,000,000.00	11,603,540.00	-100,000,000.00				866,100,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	80 Persen	80.33 Persen	916,100,000.00	210,000,000.00	11,603,540.00	-904,496,460.00				866,100,000.00
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	0 Orang	706,100,000.00	210,000,000.00	11,603,540.00	-694,496,460.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA		706,100,000.00
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja											
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	1 Lembaga	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota											
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	5 Unit	160,000,000.00	0.00	0.00	-160,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	50 Persen	50 Persen	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00				0.00
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi											
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Perizinan	1 Perizinan	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	96 Persen	2.33 Persen	500,000,000.00	46,842,130.00	14,179,304.00	-290,000,000.00				210,000,000.00
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	8 Lowongan Kerja	15 Lowongan Kerja	280,000,000.00	46,842,130.00	14,179,304.00	-265,820,696.00				210,000,000.00
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja											
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	2 Orang	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja											
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	10 Orang	10 Orang	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja											
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	20 Orang	130,000,000.00	0.00	0.00	-130,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		130,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan											
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	1 Orang	1 Orang	20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja											
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	20 Orang	0 Orang	50,000,000.00	46,842,130.00	14,179,304.00	-35,820,696.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)		50,000,000.00
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)</i>	10 Orang	10 Orang	190,000,000.00	0.00	0.00	-190,000,000.00				0.00
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online											
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000.00	0.00	0.00	-90,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	1 Orang	1 Orang	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja											
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	5 Orang	5 Orang	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	10 Persen	10 Persen	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00				0.00
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)											
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	10 Orang	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)	5 PERSEN	5 PERSEN	400,000,000.00	22,753,000.00	35,719,994.00	-100,000,000.00				300,000,000.00
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	4 Persen	4 Persen	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00				0.00
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan											
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase perkara yang diselesaikan</i>	65 Persen	0 Persen	300,000,000.00	22,753,000.00	35,719,994.00	-264,280,006.00				300,000,000.00
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	1 Perkara	0 Perkara	150,000,000.00	22,753,000.00	28,220,687.00	-121,779,313.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)		150,000,000.00
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	3250 Orang	3250 Orang	150,000,000.00	0.00	7,499,307.00	-142,500,693.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150,000,000.00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				300,000,000.00	0.00	10,577,979.00	-289,422,021.00				325,000,000.00
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				300,000,000.00	0.00	10,577,979.00	-289,422,021.00				325,000,000.00
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DITETAPKAN	100 PERSEN	100 PERSEN	100,000,000.00	0.00	8,970,119.00	125,000,000.00				225,000,000.00
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya</i>	1 Kawasan	1 Kawasan	100,000,000.00	0.00	8,970,119.00	-91,029,881.00				225,000,000.00
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
			<i>Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000.00	0.00	8,970,119.00	-91,029,881.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		225,000,000.00
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIKEMBANGKAN	100 PERSEN	100 PERSEN	200,000,000.00	0.00	1,607,860.00	-100,000,000.00				100,000,000.00
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	<i>Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya</i>	2 SKP	2 SKP	200,000,000.00	0.00	1,607,860.00	-198,392,140.00				100,000,000.00
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman											
			<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>	50 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100,000,000.00
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman											
			<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	6 Satuan P ermukiman	6 Satuan P ermukiman	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0.00
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman											
			<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	-	0 Satuan P ermukiman	0.00	0.00	1,607,860.00	1,607,860.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		0.00
	J U M L A H					8,145,886,020.00	6,256,338,200.00	5,376,576,190.00	-2,769,309,830.00				7,690,886,020.00
		BALAI LATIHAN KERJA				52,000,000.00	114,000,000.00	75,113,518.00	23,113,518.00				52,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10,000,000.00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	24,000,000.00	58,600,000.00	63,000,435.00	39,000,435.00				24,000,000.00
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000.00	4,600,000.00	4,500,435.00	-499,565.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A DANA BAGI HASIL (DBH)		5,000,000.00
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19,000,000.00	54,000,000.00	58,500,000.00	39,500,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		19,000,000.00
	J U M L A H					52,000,000.00	114,000,000.00	75,113,518.00	23,113,518.00				52,000,000.00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pada Renja perubahan Tahun 2025 terdapat **pengurangan** anggaran sebesar Rp. 2.746.196.312,00 dimana anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 8.197.886.020.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp. 5.451.689.708,00. Adapun pengurangan terjadi disebabkan adanya efisiensi anggaran dan hanya menyisakan program kegiatan rutinitas untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan baik ASN maupun Non ASN serta biaya operasional kantor dan rapat penetapan UMK, selain itu juga diutamakan untuk pembayaran utang tahun 2024 sebesar Rp. 678.949.899,00. Efisiensi anggaran yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

Ranai, 22 September 2025

